

IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2019.

Hafid Muid¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

- 1) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810137
 - 2) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1117048501
 - 3) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1118109201
- Email: muidhafid@gmail.com

ABSTRAK

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dari berbagai pengertian/definisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktek di lapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Untuk itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memang sudah harus menjadi kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak, dan Apa saja kendala dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai pengemis menurut Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat kualitatif Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data-data yang di peroleh dalam penelitian ini di analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental. Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagai pengemis di Kabupaten Banjar di laksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Banjar bersama Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar.

Kata kunci: *Anak, Perlindungan Anak, Pengemis Anak*

ABSTRACT

The definition of children in various laws and regulations has pluralism. This is as a result of each statutory regulation regulating children separately in defining children. The various meanings/definitions show that there is disharmony in existing legislation, so that in practice in the field there will be many obstacles that occur as a result of these differences. For this reason, the Law on Child Protection must become a policy related to the fulfillment of children's rights.

This research focuses on two problem formulations, namely how to apply legal protection to children as beggars based on Banjar Regent Regulation Number 13 of 2019 concerning Child Protection, and What are the obstacles in providing legal protection to children as beggars according to Banjar Regent Regulation Number 13 of 2019 concerning Child protection.

This research is an empirical research, which is qualitative. Data collection techniques using observation and interview techniques. The data obtained in this study were analyzed using a qualitative descriptive method. From this research, it was found that the state, government and local governments are obliged and responsible for respecting the fulfillment of children's rights regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, ethnicity, culture and language, legal status, birth order and physical condition and/or mentally. The government is obligated and responsible for formulating and implementing policies in the field of implementing child protection. The implementation of child protection as beggars in Banjar Regency is carried out by the Satpol PP of Banjar Regency together with the Social Service and the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Banjar Regency.

Keywords: Children, Child Protection, Child Beggars

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Pradjasto Hardojo, (2009), *"Mendahulukan Si Miskin"*, Semarang: Buku Sumber Bagi Anggaran Pro Rakyat
- Eka Sastra, (2017), *Kesenjangan Ekonomi*, Bandung: Expose PT Mizan Publika
- Firda Miftakhul Jannah, (2020), "Peningkatan Ekonomi di tengah Pandemic Dalam Menunjang Pergerakan Pertumbuhan Ekonomi di Surabaya", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1 Nomor 7, Edisi: Desember (2020), hlm. 1427.
- Ibu Merilu Ripner, S.E., M.Sos. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial (P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Martapura 05 Juli 2022.
- Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 70.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2010), *Sosiologi: "Teks Pengantar dan Terapan"*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 178.
- Ninik Yuniarti, (2012), "Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal Tidar Oleh Keluarga", *Jurnal Komunitas*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 214-215.
- Parsudi Suparlan, (1995), *"Kemiskinan Perkotaan"*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja, <https://satpolpp.banjarkab.go.id/>, tanggal 24 Juni 2022.
- Rohana S.ST., M.Kes. Kepala Seksi Tuna Sosial dan Napza, Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Martapura, 05 Juli 2022.
- Rohana S.ST., M.Kes. Kepala Seksi Tuna Sosial dan Napza, Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Martapura, 05 Juli 2022.
- Rudy Ramadhani S.Hut. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, Martapura, 06 Juni 2022.
- Soerjono Soekanto, (2019), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Sri Kuntari dan Eny Hikmawati, (2017), "Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Volume 41, Nomor 1, April (2017), hlm. 11-26.